

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi membawa beragam perubahan signifikan seiring dengan perkembangan zaman dalam pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan informasi menjadi salah satu kebutuhan utama yang diperlukan bagi semua orang. Informasi tidak hanya sekedar bagian alat komunikasi melainkan juga dasar pengambilan keputusan dan berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan individu maupun organisasi. Menurut Foskett (dalam Puji Astuti, 2008) *information is knowledge shared by communication* yang dapat diartikan sebagai pengetahuan akan suatu informasi menjadi dasar terjadinya komunikasi. Sebagai makhluk sosial yang tak luput dari berbagai interaksi dan aktivitas komunikasi, informasi menjadi kunci dalam jalannya kehidupan sehari – hari.

Arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat membuat kebutuhan informasi kian meningkat. Transparansi atau keterbukaan menjadi salah satu kunci dalam menyediakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) bersamaan dengan upaya partisipasi publik serta akuntabilitas negara. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan akses informasi yang merata bagi setiap warga negaranya, dan berpegang pada esensialitas dari keberadaan informasi negara turut hadir dalam memberikan beragam informasi kepada masyarakatnya. Di Indonesia, hak kebutuhan informasi dijamin kepada seluruh masyarakatnya yang tertuang dalam Undang – Undang Dasar (UUD)

1945 pasal 28F yang pada dasarnya menyatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pemenuhan atas kebutuhan informasi publik menjadi lebih krusial, dibuktikan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang semakin terbuka dan semakin membutuhkan bentuk pertanggungjawaban.

Keberadaan UUD 1945 pasal 28F yang menyediakan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi semakin menggambarkan bahwa informasi menjadi sumber daya yang berharga akan kehidupan seorang individu maupun akan keberjalanan negara. Negara Indonesia secara lebih lanjut menjamin kebutuhan informasi masyarakat, selain tertuang pada UUD 1945 negara juga memiliki dasar hukum lain yakni UU No 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Peran negara tidak hanya berhenti pada pembuatan kebijakan saja, melainkan berusaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan pemenuhan hak kebutuhan informasi masyarakat dan untuk itu dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai bagian dari satuan pemerintahan yang bertanggung jawab dalam keterbukaan informasi publik.

PPID menjadi perwujudan penting akan peranan pemerintah sebagai badan publik. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP), semua warga negara berhak untuk memperoleh informasi dan sebagai bentuk kewajiban dari badan publik dalam menyediakan serta melayani permintaan akan pemenuhan kebutuhan informasi publik. Ditinjau dari keberadaan regulasi tersebut, muncul tatanan pedoman atau

aturan sebagai bentuk implementasi milik Pemerintah Daerah salah satunya ialah Provinsi Jawa Tengah. Proses lahirnya PPID di Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012 mengenai Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi Jawa Tengah. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Tengah diketuai oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. PPID sendiri bertanggung jawab dalam proses layanan informasi publik yang meliputi proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik di setiap tatanan institusi pemerintahan. PPID terkhusus pada PPID Provinsi Jawa Tengah menjadi alat tukar informasi atau transfer informasi yang digunakan pemerintah Jawa Tengah untuk membangun citra baik di era reformasi birokrasi saat ini, ditambah keinginan untuk membangun sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* memerlukan aspek transparansi dan akuntabilitas yang dapat dihadirkan melalui peran PPID Provinsi. Selain aspek transparansi dan akuntabilitas, kehadiran PPID juga seharusnya memudahkan kebutuhan masyarakat dalam ketersediaan informasi.

PPID Provinsi Jawa Tengah menjadi fokus utama dalam penelitian ini karena berbagai alasan yang kuat dan relevan, salah satu faktor utama ialah prestasi yang diraih PPID Provinsi sebagai badan publik informatif. Penghargaan ini berhasil diraih secara konsisten 7 tahun berturut – turut sejak tahun 2018 hingga tahun 2024 kemarin dalam ajang Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI). Penghargaan ini menggambarkan proses panjang dan

dedikasi dalam upaya pemenuhan keterbukaan informasi bagi masyarakat Provinsi Jawa Tengah akan akses informasi yang mudah dan berkualitas dan upaya pemenuhan peran dan fungsi yang akan diuraikan lebih lanjut dalam penelitian ini.

Provinsi Jawa Tengah berdasarkan survei terbaru yang diselenggarakan oleh katadata pada tahun 2024 termasuk kedalam salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang besar yakni 38,13 juta jiwa. PPID Provinsi tidak hanya berperan sebagai pengelola informasi di tingkat provinsi melainkan juga membawahi sekurang – kurangnya 35 PPID Kabupaten serta Kota. Selain itu, PPID Provinsi juga membawahi 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah maupun berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. PPID Jawa Tengah juga turut membawahi 8 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Jawa Tengah seperti PT. Bank Jateng, PT Jateng Petro Energi dan keenam BUMD lainnya. Struktur yang kompleks tersebut melahirkan proses berpikir yang mendalam mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik berdasarkan regulasi yang mengatur yakni Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012.

PPID Provinsi sendiri terletak di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika pada Jl. Menteri Supeno I / 2, 50243. Semarang, Jawa Tengah. PPID Provinsi Jawa Tengah menggunakan alamat *website* <https://ppid.jatengprov.go.id/> sebagai sarana pelayanan informasi bagi

masyarakat Jawa Tengah. Situs *website* PPID Jawa Tengah beragam menu pilihan akan layanan informasi publik seperti layanan permohonan informasi, keberatan informasi, layanan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, serta adanya informasi tersedia setiap saat. Dengan keberadaan kanal digital ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses bentuk ketersediaan informasi publik kapan saja dan dimana saja. Ketersediaan berbagai menu informasi publik menunjukkan bahwa di era keterbukaan saat ini, kehadiran dan peran PPID menjadi krusial dalam menampilkan citra baik dari badan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat atau *public oriented* akan kebutuhan informasi.

Gambar 1. 1 Website PPID Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Website PPID Provinsi Jawa Tengah, 2023

Kehadiran PPID dapat membentuk pola hubungan komunikasi yang lebih demokratis akan pemerintah dengan masyarakat, situasi pemerintah sering dianggap tertutup akan informasi terkhusus yang berkaitan dengan kinerja pemerintah ditambah peran masyarakat yang masih apatis serta kurang berpartisipasi terhadap perkembangan kinerja pemerintah membuat kehadiran PPID dalam institusi pemerintahan menjadi angin segar dalam unsur

pemberian informasi publik. Oleh karena itu PPID Provinsi sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan informasi publik dengan transparansi yang disediakan badan publik sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel. Aspek partisipasi publik juga berkaitan dengan keterbukaan informasi publik sejalan dengan transparansi dan akuntabilitas pada tata kelola pemerintahan yang baik. Partisipasi publik sering menjadi titik lemah dalam pelaksanaan keterbukaan informasi karena masih minimnya masyarakat yang memahami betul akan peran dan fungsi PPID. Sehingga, tidak hanya berupaya untuk menganalisis peran dan fungsi PPID Provinsi Jawa Tengah saja melainkan berupaya mengidentifikasi kendala serta keberhasilan yang menjadi peluang dalam proses pengelolaan layanan informasi publik demi mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Tengah.

Melihat beragam upaya keberhasilan tata kelola pemerintahan sebagai peluang dengan kendala dan menganalisis peran dan fungsi PPID Provinsi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan hasil analisis peran dan fungsi PPID Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Dengan pemahaman keterbukaan informasi dan upaya PPID Jawa Tengah beroperasi diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis bagi sistem keterbukaan informasi di Indonesia berdasarkan pada minat dan rasa ingin tahu yang tinggi mengenai keberjalanan PPID dalam mewujudkan kebutuhan informasi masyarakat dalam kondisi realita sebenar – benarnya. Sehingga, judul yang dipilih dalam pelaksanaan tugas akhir ini ialah

“Analisis Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Tengah”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan keterbukaan informasi publik berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012?
2. Apa saja peluang dan kendala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan keterbukaan informasi publik berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya :

1. Menganalisis dan menguraikan peran dan fungsi dari PPID Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan keterbukaan informasi publik berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012
2. Menganalisis dan menguraikan peluang dan kendala yang dialami dan dimiliki oleh PPID Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan keterbukaan informasi publik berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis :

1. Penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan teori berkaitan dengan pelayanan informasi maupun tata kelola pemerintahan bagi ketersediaan informasi publik.
2. Memberikan manfaat bagi pelaksana PPID dalam perwujudan pengelolaan informasi
3. Dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis

1.4.2 Manfaat praktis :

1. Bermanfaat bagi pembaca maupun penulis mengenai badan publik informatif di Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh PPID Provinsi Jawa Tengah
2. Menjadi acuan dasar bagi pemerintah di daerah lain untuk mengembangkan badan publiknya supaya terintegrasi dengan berbagai informasi sehingga dapat mewujudkan badan publik informatif di daerahnya masing-masing.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi gambaran bagi peneliti untuk mendasari penelitian yang akan dijalankan dan akan menambah daya pandang baru mengenai pengelolaan informasi yang dilakukan oleh tatanan pemerintahan secara khusus oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID, selain itu penelitian terdahulu juga dijadikan sebagai informasi tambahan

mengenai berbagai capaian hasil penelitian yang berkaitan dengan kondisi sebenar – benarnya mengenai PPID. Penelitian dengan judul yang persis sama seperti penelitian ini nihil diketemukan, namun terdapat berbagai penelitian yang hampir mirip dan sesuai dirasa dapat menjadi rujukan akan penelitian ini, diantaranya ;

Penelitian pertama dilakukan oleh Anggie Octaviany (2022) yang berjudul Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung. Penelitian ini dirasa relevan karena seiras dengan penelitian yang ingin peneliti jalankan. Penelitian ini melihat peranan dengan penggunaan teori Horoeopetri Arimbi dan Santosa dalam melihat fokus peran PPID yang diwujudkan melalui upaya pelayanan informasi publik guna mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Lampung, dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara observasi dan dokumentasi, sehingga dapat ditemukan bahwa dengan melihat peran PPID Provinsi Lampung sudah cukup baik karena dibuktikan dengan kebijakan yang dibuat dalam layanan informasi, strategi yang dicapai dan adanya koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan informasi.

Dalam penelitian Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bungo dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik milik Sari dan Mulyadi (2020) secara lebih khusus melihat kinerja dari pelayanan kebutuhan informasi di Kabupaten Bungo, dengan menilik berbagai indikator kinerja mulai dari produktivitas, kualitas layanan,

ketepatan waktu, responabilitas, responsivitas hingga kerja sama yang dimiliki oleh PPID Kabupaten Bungo.

Seperti penelitian terdahulu sebelumnya, penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menemukan hasil capaian penelitian. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa PPID Kabupaten Bungo masih belum dapat menjalankan peran sesuai indikator kinerja secara maksimal dan menimbulkan konsekuensi pelayanan yang tercipta kurang memuaskan, dan belum adanya bentuk pengembangan yang signifikan dalam penggandaan informasi bagi publik baik digital maupun non digital sehingga masih banyaknya hambatan dalam pencapaian pemenuhan keterbutuhan informasi dan keterbukaan informasi oleh PPID Kabupaten Bungo.

Penelitian ketiga, yang dilakukan oleh Trijayanto dan Idrus (2019) mengenai Peran PPID Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik melihat Kota Yogyakarta sebagai kota pertama yang menyelenggarakan PPID dan memperoleh penghargaan PPID terbaik dari dewan pers pada tahun 2015, tentu berbeda kondisi pada tahun 2015 dan tahun 2019 saat terselenggaranya penelitian. Dengan menggunakan metode kualitatif capaian hasil dari penelitian ini ialah PPID Kota Yogyakarta dirasa masih kurang dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sesuai UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP ditambah berbagai kendala seperti belum responsifnya pelayanan online serta kemampuan SDM yang kurang pada PPID Kota Yogyakarta ditemukan dalam penelitian ini.

Penelitian keempat, yang dilakukan oleh Elizabeth Evelyn Asmono (2021) mengangkat permasalahan terkait mengetahui proses implementasi layanan informasi publik PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang yang melalui situs ppd.semarangkota.go.id pada Tahun 2021/2022. Peneliti dalam memperoleh data dengan cara melalui wawancara bersama para narasumber.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, bidang pelayanan dan pengelolaan informasi serta bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang, memiliki tugas pelayanan mengenai data peserta didik. Pengimplementasian PPDB Tahun 2021/2022 lebih baik dengan adanya sistem baru prapendaftaran sebagai verifikasi data. Kendati demikian, masih ditemui kesalahan input identitas data peserta didik dari luar zona menjadi data pendaftar dalam zona seperti yang pada hasil seleksi. Selain itu, dalam menanggapi pengaduan melalui berbagai media sosial yang dimiliki masih belum semuanya ditanggapi dengan baik. Namun secara keseluruhan data yang disediakan pada situs telah lengkap dan cukup dipahami serta pemanfaatan situs PPDB telah berjalan baik sesuai dengan prinsip good governance.

Penelitian kelima, yang dilakukan oleh Muh. Wira Waskito (2024) mengangkat gap penelitian mengenai adanya tuntutan terkait keterbukaan informasi publik sesuai dengan urusan pemerintahan konkuren sub bab bidang komunikasi dan informatika, dimana saat ini mengalami transparansi informasi kepada publik dan media yang belum memadai.

Metode Penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah dengan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori Kualitas Pelayanan Publik menurut Pasolong. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara teknik triangulasi data yakni data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa bentuk pelayanan yang diberikan oleh PPID kepada masyarakat terdiri atas dua bentuk yakni pelayanan langsung di Diskominfo Kota Makassar dan juga pelayanan online melalui website resmi PPID Kota Makassar. Kendati demikian, pelayanan yang diberikan belum baik dan maksimal dikarenakan tempat pelayanan yang belum terfasilitasi secara maksimal dan keandalan pelayanana yang belum bisa diandalkan.

Penelitian keenam, yang dilakukan oleh Fathur Firman Syeh (2022) mengangkat isu terkait hak masyarakat secara luas dalam memperoleh hak atas informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP) disahkan. Sejatinya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbukaan informasi publik yang ditampilkan pada situs web Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan di tahun 2022.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sensus (total sampling) yang bertujuan untuk menentukan populasi, yaitu sebanyak 24 situs web resmi milik Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan. Menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan tipe deskriptif. Data primer diperoleh dari pengisian lembar coding untuk menilai keterbukaan

informasi, adapun indikator kelengkapan informasi bersumber dari Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan literatur yang relevan dengan objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa situs web pemerintah daerah se- Sulawesi Selatan yang merupakan saluran komunikasi massa digital dan inisiatif e-government belum menunjukkan hasil yang maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 49,24% situs web yang menampilkan informasi secara ‘tidak lengkap’, 28,41% situs web yang menampilkan informasi secara ‘cukup lengkap’, dan 22,35% situs yang menampilkan secara ‘lengkap’

Titik temu dari keenam penelitian terdahulu yang peneliti gunakan ialah penelitian tersebut menyoroti kondisi sebenar – benarnya daripada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di bermacam tingkatan baik provinsi, kota maupun kabupaten dan memberikan masing – masing pendalaman terhadap peranan PPID dan kinerja yang dilakukannya sesuai dengan dasar kebijakan yang mengatur dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini selain perbedaan pada objek yang diteliti yang merupakan PPID Provinsi Jawa Tengah juga melihat upaya dan berbagai hambatan dalam peranan dan fungsi daripada PPID Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat membantu berbagai macam PPID di berbagai bagian tingkatan pemerintahan Indonesia dalam mewujudkan pelayanan publik terkhusus yang berkaitan dengan kebutuhan informasi masyarakat.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi berasal dari bahasa latin yakni *informationem* yang diartikan dengan ide gagasan, konsep hingga suatu penjelasan. Informasi dapat dijabarkan sebagai segala hal yang dikomunikasikan baik melalui lisan secara langsung, maupun melalui media perantara seperti video ataupun media lainnya. Informasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dinyatakan sebagai pemberitahuan atau suatu kabar serta berita mengenai suatu hal. Dalam *Oxford English Dictionary* informasi dijabarkan sebagai sesuatu yang dapat diberitahukan atau dijelaskan (*that of which is apprised or told*), keterangan (*intelligence*), dan berita (*news*). Menurut Rusdiana (2018) dalam Zainuddin (2021) informasi ialah suatu data yang memerlukan proses pengolahan dan memiliki nilai bermanfaat karena sudah melalui proses pemaknaan bagi penerima informasi.

Informasi dari beragam penjelasan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kabar atau pesan yang diberikan dari pihak yang satu untuk pihak yang lain dan dapat diterima serta dipahami, namun tentu terlihat bahwa informasi dalam penyampaian maupun dalam penerimaannya memerlukan konteks secara lebih jelas untuk dapat ditarik kesimpulan, sehingga bentuk informasi tanpa konteks akan menjadi sia – sia karena tidak dapat dipahami walaupun dapat diterima. Menurut Zorkoczy (1990), suatu informasi yang

berkualitas dapat membuat penerima peka terhadap lingkungan sehingga mampu mengambil tindakan untuk mengatasi setiap perubahan situasi yang terjadi. Daya atau kemampuan yang dimiliki informasi ini tampak dalam kemampuannya membentuk gagasan, baik fisik maupun mental. Dalam kelanjutannya, informasi yang bermutu rendah dapat menimbulkan kesalahpahaman atau penyimpangan makna. Dalam penjelasan oleh Suhendar (2010) dinyatakan bahwa informasi merupakan hasil akhir akan berbagai macam proses yang terdiri dari manipulasi dan pengorganisasian suatu data melalui suatu cara untuk menambah pengetahuan akan penerima informasi, dalam kalimat lain informasi ialah suatu jalinan sistem yang saling terhubung dengan berbagai macam kepentingan dan suatu data yang terwujud dalam bentuk pesan. Ati dan dkk (2014) dalam buku Dasar - Dasar Informasi menggambarkan jalinan sistem tersebut dalam 3 makna besar informasi yang dikemukakannya yakni informasi sebagai suatu proses yang merujuk pada suatu kegiatan sehingga menjadi terinformasi, lalu informasi sebagai pengetahuan yang mengacu ke beragam kejadian yang terjadi di dunia hingga yang tak terhingga serta informasi sebagai suatu benda atau bentuk nyata pengetahuan lewat simbol – simbol yang dibaca dan ditangkap pancaindra.

Berbagai macam poin penjelasan ahli akan informasi akan menjadi lebih bermakna dalam penelitian ini apabila dikaitkan

dengan keberadaan poin Keterbukaan dan Publik. Regulasi yang secara khusus mendasari dan mengatur mengenai informasi publik yakni UU No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan secara khusus sebagai berikut bahwa

Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan keberadaan Undang-Undang No 14 tahun 2008 mengenai informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pada pasal 7 ayat 1 (satu) dinyatakan bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan dan/atau memberikan berbagai informasi publik yang terdapat dalam naungan kewenangan suatu badan publik dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dengan menyesuaikan ketentuan informasi yang dikecualikan. Dalam pasal 7 ayat 2 (dua) dinyatakan bahwa badan publik secara wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. sehingga terlihat dengan nyata regulasi akan keterbukaan informasi publik sudah tersedia oleh negara, hanya tinggal melihat keberjalanan dari realita yang sesungguhnya.

Keterbukaan dalam informasi publik juga melihat kinerja badan publik sebagai pelaku dari tatanan pemerintahan. Dalam penelitian ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), terkhusus PPID Provinsi Jawa Tengah, berproses dalam penyediaan informasi publik untuk turut serta mendorong

terciptanya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan UU No 14 tahun 2008. Keterbukaan informasi menurut Hollyer (2014) dalam Ricky (2022) upaya menghadirkan transparansi atas pergerakan informasi yang secara luas dan bebas, sehingga seluruh informasi dalam badan publik terkhususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh masyarakat. Perwujudan UU KIP tersebut diturunkan dalam pemerintahan daerah yakni pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang melahirkan PPID Provinsi Jawa Tengah.

Dalam melihat keberjalanan dari realita yang sesungguhnya dari suatu kebijakan, dibutuhkan konsep sebagai fundamental dari keberjalanan suatu kebijakan yang menggunakan regulasi terkait. Penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 sebagai landasan awal. Menurut penuturan Syamsir (2014), peran adalah perangkat tingkah yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Yusuf (2023) menyampaikan bahwa peran merupakan aktivitas yang dijalankan seseorang maupun suatu lembaga atau organisasi dan diatur dalam ketetapan yang berisi fungsi dari peran tersebut. Istilah peran dalam bahasa inggris disebut dengan *role* yang dipadankan dengan artian tugas maupun kewajiban dalam suatu pekerjaan. Peran dapat disimpulkan

sebagai suatu upaya yang harus dilakukan karena menjadi bagian dari kewajiban dalam suatu usaha sesuai dengan kedudukannya.

Peran sendiri memiliki kategori jenis peran yang disampaikan menurut Cohen yang dikutip dalam Yusuf (2023), sebagai berikut :

- a) Peran nyata (*anacted role*) adalah suatu cara yang betul dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi untuk menjalankan suatu peran.
- b) Peran yang dianjurkan (*prescribed role*) adalah tatanan cara yang diharapkan publik dari pihak yang memiliki kedudukan dalam menjalankan peranan tertentu.
- c) Konflik peran (*role conflict*) adalah suatu kondisi ketika seseorang yang menduduki status dan menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d) Kesenjangan peran (*role distance*) adalah pelaksanaan peran secara emosional.
- e) Kegagalan peran (*role failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan suatu peran yang diembannya.
- f) Model peran (*role model*) adalah kondisi peran dari seseorang yang tingkah lakunya menjadi junjungan, dicontoh, ditiru, serta diikuti.

- g) Rangkaian atau lingkup peran (*role set*) adalah hubungan seseorang atau lembaga dengan individu atau lembaga lainnya dalam menjalankan perannya.

Peran PPID Provinsi Jawa Tengah dalam tatanan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012 termasuk kedalam jenis peran nyata yang dilakukan untuk menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Peran tersebut dijabarkan pada pasal 13 sebagai berikut :

- a) penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
- b) pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c) pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d) penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- e) pengujian konsekuensi;
- f) pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
- g) penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
- h) penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Dalam penelitian ini, peran PPID akan dikelompokkan kedalam 2 indikator utama, yakni peran sebagai pengelola informasi dan pelayan informasi. Proses pengelompokan tersebut mengacu pada 8 ayat yang tercantum pada pasal 13 dengan mempertimbangkan proses pengelolaan dan pelayanan informasi sesuai dengan tugas yang dijabarkan, yakni proses pengelolaan yang berkaitan dengan fungsi internal pada PPID Provinsi Jawa Tengah dan pelayan informasi yang berkaitan langsung dengan pihak masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Pengelompokkan dua indikator tersebut memperhatikan kalimat yang mengandung makna dari kata “pelayanan” dan berhubungan dengan pihak masyarakat secara langsung dikategorikan dalam pelayan informasi pada poin (b) dan (c), sedangkan untuk kategori pengelola informasi yang berkaitan dengan proses internal dalam mengelola informasi terdapat pada poin (a), (d), (e), (f) (g) dan (h). Proses ini diperlukan untuk secara lebih lanjut mengidentifikasi peran PPID sebagai pihak pengelola informasi dan pelayan informasi di tatanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini juga melihat fungsi dari PPID berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012, khususnya pada pasal 15. Menurut Siagian (2006 ; 155) fungsi sendiri dapat diartikan dengan perincian tugas pokok. Tugas pokok

dari suatu bidang merupakan penurunan dari fungsi pemerintah, karena suatu bidang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan sebagian dari tugas pokok pemerintahan. Penjabaran lain disampaikan oleh Sutarto dalam Zainal (2008) bahwa fungsi merupakan rincian tugas yang erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh pejabat dengan peran tertentu. Dan penurunan lain disampaikan oleh Moekijat dalam Zainal (2008) bahwa fungsi merupakan suatu aspek khusus dalam pelaksanaan peran tertentu.

Pelaksanaan dari fungsi PPID Provinsi Jawa Tengah mendasarkan pada peran yang diemban yakni sebagai pengelola informasi dan pelayanan informasi yang dijabarkan pada pasal 15 yang merupakan 2 indikator. Kedua indikator tersebut ialah dokumentasi arsip dan merupakan bagian dari peran pengelola informasi yang secara khusus melihat proses PPID Provinsi dalam mengelola, menyediakan dan mengklasifikasikan serta menyimpan berbagai arsip layanan informasi. Lalu indikator kedua ialah pelayanan dan penyelesaian sengketa informasi yang erat kaitannya dengan peran pelayan informasi terkhusus menyediakan layanan yang akurat cepat dan tidak menyesatkan.

Melihat penjabaran dari indikator peran dan fungsi tersebut tentu tak luput memperhatikan poin keterbukaan itu sendiri, yang berkaitan erat dengan teori *Good Governance* yang lebih lanjut digunakan pada penelitian ini. Transparansi atau keterbukaan

melihat hubungan terkhusus dari pemerintah dengan masyarakat dengan cara menyediakan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan secara mudah dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan keterbukaan informasi yang tercantum pada poin Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012.

1.6.2. Good Governance

Good Governance dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Secara lebih jelas, *Good Governance* merupakan keberjalanan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik atau tata kelola pemerintah yang baik. Menurut UNDP (1997) dalam Tomo (2019), *governance* atau pengelolaan pemerintahan akan dinyatakan secara *good* apabila dapat menyelesaikan permintaan atau kebutuhan publik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh negara secara efektif dan efisien. Selain itu, Thomas (1993) dalam Tomo (2019) juga menyatakan bahwa *Good Governance* diperlukan sebagai kerangka acuan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sebagai pertanda bahwa negara memiliki upaya untuk lepas dari kebergantungan negara lain. *Good Governance* tercermin dalam keunggulan negara dalam tatanan tingkatan global dan keikutsertaan positif dari masyarakat sipil.

Melalui Tomo (2019), penerapan *Good Governance* pada kepemimpinan dalam pemerintahan yakni negara yang dapat

menerapkan tiga pilar nilai dasar dari penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan, terdiri dari:

- a) Transparansi (Keterbukaan)
- b) Partisipatori (Peran langsung daripada masyarakat)
- c) Akuntabilitas (Parameter terukur kinerja pemerintah)

Faktor penentu lainnya dalam penerapan *Good Governance* menurut Mustopadidjaja AR (2001) yang menjadi titik krusial terwujudnya *Good Governance*, yakni :

- a) Pelayanan publik yang prima
- b) Pemberlakuan sistem *check and balance* sebagai penyeimbang kewenangan dalam keberjalanan pembangunan dan pengelolaan negara

Penjelasan mengenai *Good Governance* menurut pendapat para ahli mencakup pemaknaan dari peranan negara. Negara tidak hanya sebagai agen yang memiliki otoritas besar dalam suatu cakupan kelompok, tetapi juga pemerintah menjadi agen pembentuk kebijakan dan keadministrasian yang mampu memberikan pelayanan secara paripurna, aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipatori yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam keberjalanan *Good Governance*. Upaya untuk menggunakan konsep *Good Governance* akan melihat bentuk peluang dan kendala yang dihadapi serta dialami oleh PPID Provinsi Jawa Tengah dalam

mewujudkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012.

Menurut Piotrwosky dan Van Rizin (2007) yang dikutip oleh Dwiyanto (2011), transparansi dalam pemerintahan merupakan upaya nyata dalam bentuk kemampuan pemerintah untuk memaknai dan memberikan penjelasan akan kegiatan yang terjadi dalam organisasi pemerintahan secara komprehensif. Kemampuan tersebut dapat diwujudkan melalui pertemuan terbuka, kemudahan dalam mengakses dokumen, kesediaan informasi secara aktif, serta perlindungan terhadap pembocoran informasi ilegal atau *whistle blowers*. Penelitian ini pula menggunakan faktor krusial yang menunjang keberlangsungan *Good Governance*, yakni dari segi pelayanan yang paripurna bagi masyarakat dan sistem *check and balance* dalam peran perangkat badan publik, yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melihat peluang dan kendala dalam proses mencerminkan peran negara dan pemerintah di Provinsi Jawa Tengah dalam penyediaan kebutuhan informasi.

Aspek pelayanan yang prima menggunakan dua indikator dalam mengukur peluang dan kendala. Indikator pertama ialah infrastruktur teknologi dengan melihat penyediaan layanan informasi oleh PPID Provinsi melalui pemanfaatan teknologi atau digitalisasi yang optimal bagi persebaran informasi. Indikator kedua

ialah upaya pengenalan PPID Provinsi ke masyarakat melalui kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme layanan informasi yang disediakan oleh PPID Provinsi. Aspek sistem *check and balance* juga memiliki 2 indikator turunan dengan mempertimbangkan upaya menyeimbangkan pelayanan informasi dan bentuk kesetaraan informasi. Indikator pertama ialah intervensi dan tekanan politik. Indikator ini melihat PPID dalam menjaga keseragaman informasi tanpa menyebarkan disinformasi akibat kepentingan pihak tertentu yang membatasi keterbukaan informasi. Indikator kedua ialah penyelarasan informasi pada setiap PPID Pelaksana dan upaya menyeimbangkan kebutuhan informasi dengan perlindungan data.

Kedua aspek khusus dalam teori *Good Governance* berupa pelayanan publik yang prima dan sistem *check and balance* menghasilkan peluang dan kendala yang ditemui serta dialami oleh PPID Provinsi dalam mengupayakan keterbukaan informasi publik berdasarkan pedoman yang digunakan, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012.

1.7 Definisi Konsep

Penelitian mengenai Analisis Peran dan Fungsi dari PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Provinsi Jawa Tengah memiliki beragam kompleksitas, untuk itu diperlukan berbagai macam kajian literatur yang menjadi landasan konsep berpikir. Diawali dari Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012 sebagai bagian utama dalam menguraikan analisis peran dan fungsi sesuai pasal 13 dan 15 berdasarkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta dokumentasi arsip dan pelayanan – penyelesaian sengketa pada PPID Provinsi Jawa Tengah dan secara lebih lanjut dalam menguraikan peluang dan kendala yang dialami dan dihadapi PPID Provinsi Jawa Tengah menggunakan teori *Good Governance* yang akan melihat peranan PPID sebagai perpanjangan tangan negara dalam menyediakan pilar transparansi, akuntabilitas dalam melihat fungsi badan publik melalui PPID Provinsi Jawa Tengah yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong terciptanya keterbukaan dalam penyediaan informasi pada penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Provinsi Jawa Tengah.

1.8 Operasionalisasi Konsep

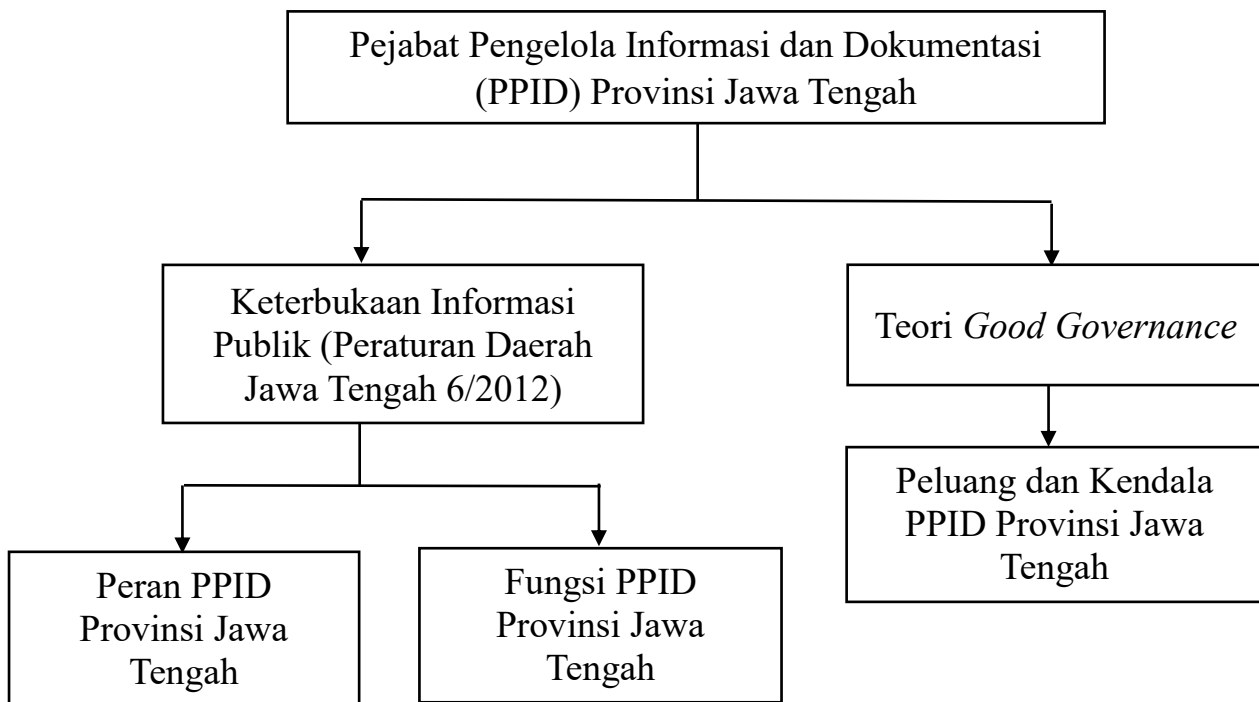
Tabel 1. 1 Tabel Operasionalisasi Konsep Analisis Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Tengah

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR
Keterbukaan Informasi Publik (berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012)	Peran (Pasal 13)	a. Pengelola Informasi b. Pelayan Informasi
	Fungsi (Pasal 15)	a. Dokumentasi arsip; b. Pelayanan dan penyelesaian sengketa.
<i>Good Governance</i>	Pelayanan publik yang prima	a. Infrastruktur teknologi b. Pengenalan PPID Provinsi Jawa Tengah (Sosialisasi kepada Masyarakat)

	Sistem <i>Check and balance</i>	a. Intervensi dan tekanan politik b. Koordinasi antar instansi
--	---------------------------------	---

1.9 Kerangka Berpikir

Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir



1.10 Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono (2013) diartikan sebagai prosedur ilmiah dalam memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga dari penjelasan ahli tersebut metode penelitian dapat dimaksudkan sebagai prosedur atau cara dalam mencari, mengolah, serta membahas data yang digunakan dalam suatu penelitian untuk tak hanya menemukan pemecahan akan permasalahan dalam penelitian tetapi berusaha memahami dan juga mengantisipasi suatu permasalahan.

1.10.1. Tipe Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan penelitian kualitatif. Kualitatif sendiri merupakan metode yang kerap dilakukan dalam penelitian. Cara atau prosedur penelitian nantinya akan ditemukan dan dihasilkan data deskriptif yang mana berbentuk kata kata tertulis maupun lisan akan subjek serta perilaku yang diamati. Melalui Abdussamad (2021) metode kualitatif diperuntukan agar menemukan data yang mendalam, yang mengandung suatu makna sehingga tidak menekankan pada generalisasi data tetapi makna akan penelitian. Metode kualitatif atas pernyataan tersebut dapat memberikan gambaran atas permasalahan secara lebih kompleks dan rinci akan hubungan peranan serta fungsi PPID.

Metode ini dipilih dan digunakan atas berbagai pertimbangan salah satunya ialah metode kualitatif dirasa lebih

dapat menggambarkan peranan dan fungsi PPID dalam berbagai perolehan capaian penghargaan badan publik informatif karena dapat melihat hakikat hubungan antara peneliti dengan responden secara lebih jelas dan langsung, ditambah metode ini dirasa lebih pantas dalam menyeduaikan pola – pola nilai yang dihasilkan nantinya dalam penelitian ini. Penelitian ini secara lebih lanjut akan diperuntukan untuk melihat fakta dan keberjalanan peranan dan fungsi dari PPID serta berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pelayanan informasi.

1.10.2. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dari penelitian ini ialah penelitian lapangan dengan sifat deskriptif analisis. Adapun maksud dari penelitian lapangan atau *field reseacrh* ialah penelitian yang dilakukan langsung dengan terjun ke realita lapangan atau keberjalanan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung terjun dengan melakukan pendekatan institusional yakni pendekatan yang melihat dan meneliti aspek – aspek dari suatu lembaga dan institusi. Sehubungan dengan penelitian ini tentu lingkup lapangan yang diteliti ialah melalui institusi yang dilihat dan diteliti yakni Badan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Sub Bagian Statistik PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dengan melihat struktur organisasi, kinerja, regulasi dan sebagainya.

Penelitian ini juga disebutkan bersifat deskriptif analisis yakni menganalisis akan bukti data yang telah ditemukan yang berupa tulisan ataupun lisan dengan memperdalam makna. Dalam Abdussamad (2021) proses analisis ini dapat dilakukan dengan mengandalkan struktur kalimat serta berbagai pertanyaan yang mendukung pemaknaan hasil pada penelitian. Sehingga memerlukan beragam data yang mengandalkan kalimat dalam mendeskripsikan hasil temuannya.

1.10.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan benda atau individu yang dapat dijadikan sumber atau tempat perolehan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini, subjek yang peneliti teliti yaitu :

1. PPID Provinsi
2. PPID Pelaksana
3. Masyarakat pengguna layanan PPID Provinsi

Penelitian ini menggunakan PPID Provinsi sebagai sumber informasi utama dengan setidaknya 3 orang dari pihak PPID Provinsi, 2 pihak PPID Pelaksana dan 3 masyarakat pengguna dengan karakteristik khusus mengetahui dan menggunakan layanan permohonan informasi di PPID Provinsi Jawa Tengah. Delapan informan tersebut dipilih karena dinilai mampu dan relevan dalam memberikan informasi sesuai dengan tujuan

penelitian yang akan peneliti lakukan. Informan dari pihak PPID Provinsi merupakan Ketua Sub Koordinator Pelayanan Informasi dan Pengelola Data PPID Provinsi Jawa Tengah Pak Mashuri, Pak Gandhy Kurniawan staff Statistik Pengolah Data dan Informasi, Ibu Anggi Ayu staff PPID Provinsi Jawa Tengah. Pihak PPID Pelaksana yakni Ibu Warih Handayani – Staff PPID Pelaksana OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan Pak Ardhianto – Koordinator Tim PPID Kota Semarang, dan ketiga masyarakat pengguna PPID Provinsi Jawa Tengah yang merupakan (D) Mahasiswi Universitas Diponegoro – Program Studi Sastra Inggris, (A) Mahasiswi Universitas Negeri Semarang – Program Studi Statistika, dan (T) Kepala Desa Soko, Kab Sragen.

1.10.4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian dapat diartikan sebagai sumber dari perolehan data dalam keberjalanan suatu penelitian yang dimiliki oleh subjek penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan 2 sumber data yakni :

1. Sumber Data Primer :

Data penelitian ini digunakan untuk mendapatkan analisis yang mendalam karena data primer merupakan sumber utama dari data yang diperoleh. Pelaksanaan wawancara serta observasi pelaksanaan layanan informasi dari PPID Provinsi Jawa Tengah

2. Sumber Data Sekunder :

Sumber data yang sifatnya hanya sebagai tambahan atau pelengkap dari data utama yang secara tidak langsung diambil di lapangan, yakni bentuk data yang berbentuk seperti jurnal, laporan atau bahkan dokumen – dokumen lain yang relevan dari lembaga maupun instansi pemerintahan yang terkait yakni bentuknya seperti Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID), Laporan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat).

1.10.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulkan data didasarkan pada waktu, tenaga serta biaya yang dimiliki dalam melakukan proses penelitian sehingga membuat penelitian menjadi lebih efisien. Dalam penelitian kualitatif terdapat istilah triangulasi, triangulasi dalam Abdussamad (2021) yakni upaya perbandingan sumber data yang telah dikumpulkan dan dibandingkan dengan teknik lain, sehingga dapat dinyatakan bahwa peneliti tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga mengecek keabsahan dari suatu data dengan berbagai teknik pengumpulan dan berbagai sumber yang ada. Dalam penelitian ini sendiri menggunakan 3 teknik yakni:

a. Wawancara

Dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan dan dipenuhi oleh informan yakni Ketua Sub Koordinator Pelayanan Informasi dan Pengelola Data PPID Provinsi Jawa Tengah Pak Mashuri, Pak Gandhy Kurniawan staff Statistik Pengolah Data dan Informasi, Ibu Anggi Ayu staff PPID Provinsi Jawa Tengah. Penentuan informan berdasarkan pernyataan Sugiyono dalam Zurich (2021) penentuan jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan rumus statistik yang pasti dalam suatu penelitian kualitatif tetapi melalui pertimbangan akademis seperti teori saturasi data membuat peneliti dapat menghentikan wawancara setelah mendapatkan informasi yang berulang dan tidak terdapat data baru yang signifikan, dan secara khusus menggunakan teknik *snowball sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang dilakukan dengan mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan yang menerus (Abdussamad, 2021). Teknik tersebut dipilih sebagai cara untuk menemukan informan dengan kriteria yang dapat membantu pemenuhan penelitian ini yakni bagian dari pihak PPID Provinsi sebagai bagian dari sumber informan utama, untuk sumber informan mendukung ialah pihak yang memiliki rantai hubungan pada PPID Provinsi sebagai PPID Pelaksana yakni Ibu Warih

Handayani – Staff PPID Pelaksana OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan Pak Ardianto – Koordinator Tim PPID Kota Semarang dan pihak masyarakat sebagai pengguna layanan PPID Provinsi Jawa Tengah yakni (D) Mahasiswi Universitas Diponegoro – Program Studi Sastra Inggris, (A) Mahasiswi Universitas Negeri Semarang – Program Studi Statistika, dan (T) Kepala Desa Soko, Kab Sragen.

b. Observasi

Melihat serta mengabadikan langsung berbagai fenomena sosial yang terjadi di lapangan demi keperluan penelitian yang menunjang tujuan penelitian dilaksanakan, bentuk teknik ini dilakukan dalam bentuk melihat langsung proses keberjalanan layanan informasi yang dilakukan oleh PPID Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat pengguna layanan dan bentuk kerjasama dengan PPID Pelaksana. Teknik pencarian data melalui observasi ini dilakukan untuk memperkuat data dari proses wawancara.

c. Dokumentasi

Berdasarkan Creswell (2014) Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan notulen, arsip, buku & dokumen dalam memberikan konteks peristiwa historis yang membantu menafsirkan perkembangan dalam

fenomena yang diteliti. Konteks disini berarti yang berkaitan dengan PPID Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan proses layanan informasi yang disediakan oleh PPID Provinsi Jawa Tengah dengan berbagai sumber seperti arsip Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, atau basis data *online* dalam pelayanan informasi menggunakan website. Setelah dikumpulkan bentuk dokumen yang berhasil diperoleh akan dianalisis dan akan diidentifikasi bentuk informasi yang relevan untuk mendukung data primer.

1.10.6. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam bagian ini dijelaskan bahwa analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui jalan bekerja dari data seperti mengorganisasikan data, memilah jadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dan yang perlu dipelajari serta memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada pihak lain. Dalam penelitian ini, proses analisis data memiliki beberapa komponen yakni:

1. Reduksi Data

Merupakan suatu proses pemilahan data yang selama proses berhasil dikumpulkan dan ditemukan dan menguraikan hal-hal bermakna relevan kedalam penelitian, seperti bentuk pengolahan informasi yang diberikan oleh PPID Provinsi kepada masyarakat karena didalamnya harus melibatkan

proses menetapkan pemetaan atau pola dari bentuk yang relevan dengan penelitian.

2. Data Display

Tahapan lanjutan dari pemilahan data atau reduksi data maka akan berlanjut ke tahap berikutnya yakni penyajian data atau *data display*, hal ini dilakukan untuk memudahkan penafsiran pada data yang berhasil ditemukan, data yang direduksi atau disajikan dapat berupa dalam berbagai macam bentuk seperti tabel, grafik atau diagram serta adanya narasi deskriptif yang menjelaskan berbagai data yang telah direduksi supaya dapat diinterpretasikan kedalam bentuk analisis yang lebih terstruktur dan sistematis serta lebih mudah dipahami

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi, hal ini dilakukan setelah mempertimbangkan data melalui reduksi data serta data display yang sebelumnya dilangsungkan. Kesimpulan harus dapat disampaikan secara verifikatif atau disertai dengan komponen bukti yang mendukung. Proses ini memerlukan upaya pengidentifikasian pola yang dihubungkan dalam data dan disimpulkan bentuk interpretasi akan temuan – temuan dalam penelitian. Terkhusus pada penelitian ini tentu akan mengidentifikasi

temuan utama yakni bentuk peran dan fungsi PPID Provinsi dalam pemberian layanan informasi serta respon masyarakat pengguna layanan akan bentuk layanan tersebut. Kesimpulan juga ditarik dari berbagai peluang dan kendala yang ditemukan dalam keberjalanan layanan PPID Provinsi Jawa Tengah.